

# PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 81 TAHUN 2007

#### TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN ARSIP DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 2008



# PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 81 TAHUN 2007

#### TENTANG

# JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN ARSIP DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 2008



# GUBERNUR JAWA TENGAH

## PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 81 TAITUN 2007

#### TENTANG

# JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## GUBERNUR JAWA TENGAH,

## Menimbang

- a. bahwa untuk mendayagunakan arsip, secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional, perlu diatur mengenai jangka waktu simpan arsip keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sesuai dengan surat Kepala Arsip Nasional Nomor PK. 01/1466B/2007 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 112/S/II-VIII.6/08/2007 perihal Pertimbangan/Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
  Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
  Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  Nomor 4548);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
     Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 5);
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 2

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 2. Arsip adalah:
  - a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

- b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-Badan swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
- Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan/fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
- Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah daftar yang berisi sekurangkurangnya jenis/seri arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya, sesuai dengan nilai kegunaannya dan digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip keuangan.
- Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip secara memindahkan arsip In Aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip statis ke Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Jenis/Seri Arsip adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan kesamaan jenis, dan merupakan unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau subyek.
- Jangka Waktu Simpan adalah menunjukkan jangka/tenggang waktu penyimpanan arsip sesuai dengan nilai kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
- Jangka Waktu Simpan Aktif adalah menunjukkan jangka waktu penyimpanan arsip aktif sesuai jenis/seri arsip pada Unit Pengolah.
- Jangka Waktu Simpan In Aktif adalah menunjukkan jangka waktu penyimpanan arsip In Aktif sesuai jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
- Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsiparsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan/Pusat Arsip telah selesai dan tidak memiliki nilaiguna.

- Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsiparsip yang karena memiliki nilaiguna sekunder wajib diserahkan ke Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah/Lembaga Kearsipan di tingkat Provinsi.
- 11. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip tersebut masih sering digunakan sebagai bahan pendukung kegiatan administrasi pemerintahan, sehingga pada saat penyusutan harus ditinjau kembali kegunaannya bagi instansi yang bersangkutan.
- Nilaiguna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.

# BAB II JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN

#### Pasal 2

- Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan fungsi keuangan dan berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Jadwal Retensi Arsip Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

# BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Denember 2007

UBERNUR AWA TENGAH,

MHEIZ

Diundangkan di Semarang pada tanggal 27 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 81

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 81 ZAHIW 2007 TANGGAL 27 Desember 2007

# JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

berlaku 3 tahun 3 tahun akhir 3 tahun 3 tahun 3 tahun akhir 3 tahun 3 tahun akhir 3 tahun 3 tahun akhir 3 tahun 3 tahu	2	JENIS/SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN	SIMPAN	No. of Contract of
NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TED  TEN  TEN  TEN  TEN  TEN  TEN  TEN		2 4	AKTIF	INAKTIF	NETERMINANT
Tablama masish berlatua 3 tahun angistan dan Pricertas APBD Selama masish berlatua 3 tahun angistan dan Angigaran bersahir 3 tahun angigaran bersahir 1 tahun setelah tahun 3 tahun angigaran bersahir 1 tahun angig	4	PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BRI ANJA DAFRAH	3	4	un
m. Strategi dan Prioritas APBD Selama maseh berlaku 3 tahun apistan, dan Anggaran Saluan Kerja Daerah/RASK Saluan Kerja Daerah / RASK 1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun anggaran berakhir 3 tahun anggaran berakhir 3 tahun anggaran berakhir 3 tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir 1 tahun anggaran berakhir 3 tahun anggaran berakhir 1 tahun	7	PENYUSUNAN RAPBD			
Saluan Kerja Daerah/RASK Saluan Kerja Daerah/RASK Saluan Kerja Daerah/RASK Saluan Kerja Daerah / RASK Saluan Setelah tahun Saluan Saluan Saluan Kerja Daerah / RASK Saluan Setelah tahun Saluan	-	Vah Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD	Selama meeds badake	A testanon	4
Saluan Kerja Daerah/RASK  Saluan Kerja Daerah/RASK  Saluan Kerja Daerah / RASK  BD KEPADA DPRD  Saluan setelah tahun anggaran berakhir  Saluan setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir  Saluan Peraturan Daerah mengenai APBD  2 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir  Saluan setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir  1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir  1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir  1 tahun setelah tahun 3 tahun salahan stahun anggaran berakhir  1 tahun setelah tahun 3 tahun salahan salaha	~	Jsulan Program, Kegistan, dan Anggaran	1 tahun setelah tahun	3 tahun	Musech
Sahuan Kerja Daerah / RASK  1 Lahun aetelah tahun 3 tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun 3 tahun	0	tencana Anggaran Satuan Kerja Daerah/RASK	anggaran berakhir 1 tahun selelah tahun	200	A de constant de la c
Stahun anggaran berakhir stahun berakhir stahun berakhir stahun anggaran berakhir stahun setelah tahun anggaran berakhir stahun anggaran sta	- OC	Cancangan Anggaran Satuan Kerja Daerah / RASK	anggaran berakhir		Musellan
ah dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD 2 tahun setelah tahun 3 tahun	a.	ENYAMPAJAN RAPBD KEPADA DPRD	anggran berakhir	o mum	Musnah
oleh Komisi DPRD  1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	Z	ola Keusingan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD	2 tahun setolah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Permisnen
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  1 tahun setelah tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	6	embahasan RAPBD oleh Komisi DPRD	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
AH (APBD) 1 tahun setelah tahun 3 tahun	2	ota Jawaban DPRD	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tehun	Permanen B
	6 2	ERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) AN REPETADA	1 tahun setelah tahun	3 tahun	Permonen

3 4	ASI UMUM (BAU), BOP & MODAL	an RASK, Biaya Administrasi Umum (BAU), 1 tahun setelah 3 tahun Permaneng deerbaharui	SK) BAU, BOP & 1 tah	Daftar Usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) BAU, BOP & MODAL 1 tahun setelah tahun 4 tahun Musnah andostan beraithin	Hasil Pembahasan Penyusunan RASK BAU, BOP, MODAL, Data Pendukung dan 1 tahun setelah tahun 4 tahun Permaneng Ammonandum Pentulaian DASK and Permaneng anggaran berakhir	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan 1 tahun sotelah tahun 3 tahun Pemanen Pemanen anggaran berakhir		31Q BAU, BOP, MODAL dan Petunjuk 1 tahun seletah 9 tahun Dinisi kembali Perhibungan Anggaran Daerah (PERDA) deerbikan	K) dan 1 tah	Defencandan, pelaksanaan, 1 Tahum nededah bedesetunan Attetus - Daventuna B
B PENYUSUNAN ANGGARAN	ANGGARAN BELANJA ADMINISTRASI UMUM (BAU),	1.1 Petunjuk penyusunan dan pembahasan RASK, Biaya Adr BOP & MODAL	1.2 Bahan Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RA MODAL	1.3 Daftar Usulan Rencana Anggaran Sr	1.4 Hasil Pembahasan Penyusunan RAS Memorandum Peniaian DASK	Penjabaran Anggaran Pendapatan da mgkasan menuut organisasinya ata	1.6 Konsep Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BAU, BOP, MODAL dan Peturjuk Operasional (PO) termasuk revisinya	1.7 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BAU, BOP, MODAL dan Petunjuk Operasional (PD), termasuk revisinya	Petunjuk pembahasan Konsep Dattar Anggaran Satuan Ke- Lembar Kerja (LK)	1.9 Ketentuan/peraturan yang menyangkut perencanaan, petaksanaan,

200		į	10
1 PENDAPATAN			
1.1 Ketenbuan/peraburan yang mengatur tentang pendapatan daerah 1.2 Bukis Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1 tahun setelah diperbahanal 1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Daerah (Pentabdenbetesa	4 tahun 9 tahun	Permanen §
2 Buch Response			
	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Deorah (Perda)diterbitkan	9 tahun	Dinlai Kembali
1.4 Hasa Perusahaan BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah	1 tahun setelah Perhaungan Anggaran	9 tahun	Dinital Kembali
1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Dalerah (PAD)	Tahun setelah	9 tahun	Dinital Kembali
5 Demonstrates almost manufactured	Daerah (Perda)dierbilkan		The Health of
- Daerah) - Daerah)	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Daerah (Perdalditerbitan	9 tahun	Dinital Kembali
1.7 Lain-lain pendapatan (Dana Konfingensi, Dana Danurat, Bantuan Dana Pilicada, dil)	1 tahun sotelah Perhitungan Anggaran Praerah (Darrandan-tera	9 tahun	Dinibi Kembali
1.8 Bukb Rekoning Koran Pemerintah Daerah	1 tahun setelah Perhibungan Anggaran Daerah (Perdabberahasan	9 tahun	Dinital Kembali
1.9 Jurnal Penerimaan Pemerintah Daerah	1 tahun setetah Perhibungan Anggaran Daerah (Perda)dilerbilikan	9 tahun	Dinilai Kembali

1.10 Buku BesantRules Bases Pa	m	4	so.
DUCCULOR DESIGN FOR DUCCULOR D			
	Perhitungan Anggaran	9 lahun	Drulai Kombali
2 BELANJA	Caerah (Perda)diterbition		THE STREET
2.1 Kontrak Jasa dan Order			
	Tiahun setelah pekerjaan	5 tahun hak dan kewaiban	Dinital kembah
Perminisas pedagasas lessas	dsorahterimakan	habis	
Pekerjaan Pasasservice report dan Benta Acara Penyelesalan			
	1 tahun setelah pekerjaan	5 Eshun	Musnah
2.3 Buikti pengeluaran kasibank upa hulincin h	diseranterimakan		
Eurino admini			
September 1 Company of the Company o	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran	5 tahun	Dinibi kembal
	District (Perdaleteration		
- SPP-LPKS	TIP AND TOTAL POLICY OF THE PARTY OF THE PAR		
18 ddS	1 tahun setelah	Stahun	Musuch
- Spp.px	Perhitungan Anggaran		
Penaghan/invoice, Faktur Pajak, Bukis Penerimaan Kas/Bank beserta bukis pendukungnya, a I Copy Faktur Pajak, Nota Koedi Bank	Darron (Perda)diterbitian		
2.5 Pembukuan Anggaran yaitu :			
- Bukin Parak-sun	1 tahun setelah	9 tahun	Danies Komboli
- Register 10 buku tambahan	Perhitungan Anggaran		
- DPP (Daftar Himpunan Pencairan Dament	Massan (Perda)diterbition		
- DHP (Daftar Himpunan Pencairan/Pengeluaran) - Kartu Pegawai Anggaran/Pengeluaran)			Ŷ
Rekening Koran Bank	The state of the s		
2.6 Dokumen wang muka dan data pendukung	Tel-system limit		
	1 tahun setelah	2 tahun	Musnah
	resident degrammers		

2.2 Monte to con-	3	ā	yn
Prote Vertikaşı			
0.00	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
2. 8 Nota Pembuliuah Anggaran (SP3) 🦓			
2.9 Konsep Perhitungan Andoarna Davisa interaction	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
2.10 Perhitungan Anggaran Dawesh (barto	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah
	1 Johan setelah Perhitungan Anggaran Daerah (Pontist dayusun	S tahun	Musnah
2.11 Nota Perhangan Anggaran Daerah (PAD) dan Pembahasan Bara	Difference (no. 1)		
Anggaran Daerah Z.12 Belanja Modal (Aşet)	1 tahun setelah berbil	5 tahun	Permanen
2.13 Belanja Modal (Non Asien)	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Daerah (Perda)diterbitkan	4 tahuo	Dinitsi Kembali
	1 tahun setetah Perhitungan Anggaran Daerah (Pendakidenbituan	5 tahun	Musnah
2. 14 Pengguntaan dana Pemerintah Ri untuk kontribusihuran dan tain-lain pada Badan/organisasi Nasional/Internasional	1 tahun seselah tahun	9 tahun	Permanen ©
2.15 Persetujuan penggunaan/pencaran anggaran	THE SECTION OF THE SE		
2 16 Dafter Gas	1 tahun setelah Perhitungan Angguran Diserah (Perda)ditentitkan	9 tahun	Distai Kembali
	1 tahun setelah tahun	3 tahun	Mosnah

7			
4. 17 Laporan Keuangan (Financial Statement) antara lain.	en	4	40
Laporan Resissasi Anggaran BAU, BOP & MODAL     Penerimaan Pajak     Penerimaan Pajak     Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)     A Laporan Resissasi Anggaran Bulanan/Piwulanan/Semesteran	1 Bahun selelah tahun anggaran berakhir	9 tahun	Dinital Kembasi
2.18 Laporan Tahunan/Japoran Ming			
2.19 Belanja Bagi Hassi/Bentuan	1 lahun setelah lahun anggaran berakhir	5 tahun	Permanen 3
2 20 SPW/ GirorChek	1 bahwa setelah perhitungan Anggaran Daerah (Penda)dilerbiskan	5 tahun	Dinilar Kembak
D BANTUAMPINJAMAN LUAR NEGERI	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Daorah (Perda)sterbitsan	9 tahun	Musnah
Blue Book/Buku Biru seperti Pedoman Pengajuan usulan proyek pinjaman/ hibah Luar Negen	1 tahun sessiah tahun	3 tahun	Permante
Ucocumen Resanggupan negara donor untuk memblayai (Grey Bock)	1 tahun setelah loan	3 tahun	Decoration
3 Dokumen Memorandum of understanding (Mol.U) day stole personal	disodangani		
Authority over 4	1 tahun selelah tahun anggaran bersangkutan bersahir	3 tahon	Permanen
Draft agreement, legal opinion, sural memoral decembers	1 Lithin sololo and	8	
5 Albkasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri, a L. usutan kurusin dana	disemblemakan	9 tahun	Dinital Kembas
	1 Fathon seedah proyek	9 tahan	Chadral Viscolant

	3	m	4	50
1	6 Apikasi penarihan dana Ri Ni banbut hawata			A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	- Reimbursement - Direct Payment - Special Account	1 tahun setelah proyek diserahlerimakan	9 tahun	Dinital Kembali
ARTON CO.	7 Otorisasi penariban dana (Payment Advice)	1 tahun setelah proyek diserahtermakan	9 tahun	Dinilai Kembali
A CONTRACT OF THE STREET	8 Realisasi pencairan dana bantuan luar negeri, yaitu : SPM beserta lampirannya, at : SPP, kontrak, 8A, dan data pendukung lainnya	1 tahun setelah proyek diserahberenakan	5 tahun	Musnah
	9 Replenisment (permintaan penankan dana dari donor) melipudi antara tain : Nomor Objection (COP), Project Implementation, Natrikcation of Contract, Withdrawl Withdrawl Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE)	1 tahun sebelah proyek diserahkermakan	9 Ishun	Dindai Kembali
0	Staff Appraisal Report	1 tahun setetah PH£N Sehsai	Z tahun	Musnah
State Contract Contra	Report/laporar yang terdiri dari dari - Progress Report - Monthly Report - Quaterly Report	1 tahun setelah proyek diserahterimakan	9 tahun	Dentas Kembali
	12 Laporan Hutang Daerah - Laporan Pembayaran Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang	1 tahun setelah berbit	3 tahun	Permanap
	13 Completion Report/Annual Report	1 Eshun setelah perhungan Anggaran Daerah (Perda)deebikan	9 tahun	Permaneri
	14 Kelentuan/Peraturan yang menyangkut bantuan/perjaman luar negan	1 Lahun setelah	4 tahun	Permanen

February AP BIDDANA PRIAMAMHBAH LUAR NEGERI (PHLN)	110		3	* -	90
1 tahun setelah ketertuan/ 2 tahun anggaran berakhir anggaran berakhir anggaran berakhir anggaran berakhir tahun setelah ketertuan/ 2 tahun anggaran berakhir anggaran Anggaran 2 tahun perhitungan Anggaran 3 tahun atelah (Perda) deebakan 3 tahun pethitungan Anggaran 3 tahun pethitungan Anggaran 2 tahun pethitungan Anggaran 2 tahun pethitungan Anggaran 2 tahun pethitungan Anggaran 3 tahun atelah (Perda) deebakan		PENGELOLAAN APBODANA PINJAMANHIBAH LUA			
1 tahun setelah ketentuan 2 tahun Peraturandperbaharui 5 tahun anggaran berakhir 2 tahun perhitungan Anggaran Daerah (Perda)diterbitian 2 tahun perhitungan Anggaran Anggaran Daerah (Perda) diserbitian 2 tahun perhitungan Anggaran Daerah (Perda) diserbitian 3 tahun Setelah Gerbitian Daerah (Perda) diserbitian 3 tahun Setelah Gerbitian 3 tahun Setelah Gerbitian 3 tahun Setelah Gerbitian 3 tahun Gerbitian Gerbitian Setelah Gerbitian Gerbitian Setelah Gerbitian	100	Imur kentang penetapan : Satuan Kerja K/Bagian Proyek Penerima	1 tahun setelah masa jabatan berakhir	9 tahun	Dinilai Kemba
1 tahun setelah ketentuan/ 2 tahun anggaran berakhir 5 tahun anggaran berakhir 2 tahun perhitungan Anggaran Daerah (Perda) diserbitian 2 tahun perhitungan Anggaran 3 tahun perhitungan Anggaran 2 tahun 2 tah	Marie 1	IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH			
1 tahun setelah tahun 5 tahun anggaran berakhir 2 tahun anggaran berakhir 2 tahun perhitungan Anggaran Daerah (Perda)diterbitikan 2 tahun perhitungan Anggaran Daerah (Perda) deerbitikan 2 tahun perhitungan Anggaran Daerah (Perda) deerbitikan 3 tahun diperbaharun 3 tahun setelah 3 tahun Baharun Daerah (Perda) deerbitikan 3 tahun Baharun Daerah (Perda) deerbitikan Baharun Daerah (Perda) deerbitikan Baharun	400	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	1 tahun setelah ketentuan/	2 tahun	Permanen
1 tahun setelah tahun 5 tahun anggaran berakhir Z tahun perhitungan Anggaran Daerah (Perda)diterbitican perhitungan Anggaran Daerah (Perda)diterbitican Z tahun perhitungan Anggaran Z tahun diperbaharun 3 tahun diperbaharun 3 tahun diperbaharun	1790	Daftar Transmise upp. 600	Peraturandperbahani		
1 tahun setelah 2 tahun Daerah (Perda)diterbitkan Tahun setelah 2 tahun Daerah (Perda)diterbitkan Tahun setelah Perda) diserbitkan Daerah (Penda) diserbitkan Tahun setelah 3 tahun diperbahanun Sahun diperbahanun Sahun diperbahanun Sahun Barah (Penda) diserbitkan Sahun diperbahanun Barah	The second second second	(DS), Bukti Jumai (BJ), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Giro Satau Giro S(Giro S/8), SPM dalam daffar ringkasan pengemba-lan pendapatan dan potongan dari pengelwaran (SPDR).	1 tahun selelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Musnah
1 tahun setelah 2 tahun perhitungan Anggaran Daerah (Perda)diterbitikan 2 tahun perhitungan Anggaran Daerah (Perda)diterbitikan 1 tahun setelah 2 tahun Derthitungan Anggaran Daerah (Perda) dierbitikan 3 tahun diperbaharun 3 tahun diperbaharun 3 tahun diperbaharun	02	Memo Penyesualan (NBP)			
1 tahun setelah 2 tahun Daerah (Penda)diterbitkan 2 tahun Pehhitungan Anggaran Daerah (Penta) diserbitkan 3 tahun diperbaharun 3 tahun diperbaharun 3 tahun	1 1 1		1 tahun setelah perhitungan Anggaran Daerah (Perda)diterbituan	2 tahun	Musnah
Tahun setelah 2 tahun Daerah (Perda)diterbitkan Tahun setelah Daerah (Penta) diterbitkan Daerah (Penta) diterbitkan Tahun setelah diperbahansi	and the	aporan realisasi bulanan SAP dari Kantor Akuntansi Reniposi Iki Abi			
1 tahun setelah 2 tahun Daerah (Penta) deebakan Daerah (Penta) deebakan 1 tahun setelah 3 tahun diperbaharun 3 tahun			1 Sahun setelah perhitungan Anggaran Daerah (Perda)diberbiban	2 tahun	Musnah
EMBANTUAN  Internation  Tahun selelah  Stahun  diperbahana	J 50	aporan realisasi trivutanan SAP dari Unit Atuntansi Witayah (UAWV) dan gabungan emua UAW/Unit Akuntansi Kantor Pusat Pusat Instansi (UAKPI)	1 tahun setelah perhitungan Anggaran	2 tahun	Musnah
MBANTUAN  Interpretation selekah  Stahun diperbahanyi  diperbahanyi	160	ENGEL OL AAN ANGGARAN DEKONSENTRAGE	Daerah (Perda) deerbitkan		
formasuk, 1 tahun setelah 3 tahun diperbahanan diperbahanan	18	TO THE STATE OF TH			
1 tahun setekah 3 tahun laksanasan diperbahanan	1.33	bijakan Umum Probram Dekonserent 4			
	25 100	Falutanketentuanpedoman Daerah menjangkut penjuauhan, temasuk n Perlanggungjawaban anggaran dekondentrasi dan pembantuan	1 tahun setelah diperbahann	3 sahun	Dealas kemboli

sah tahun 3 tahun serakhir 3 tahun serakhir 3 tahun 3 tahun serakhir serakh	21.00				
gas Pembantuan 1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir 3 tahun anggaran berakhir 3 tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir 1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir 4 tahun anggaran berakhir 4 tahun anggaran berakhir 4 tahun anggaran berakhir 4 tahun 1 tahun setelah tahun 9 tahun Negara (PAN) diundangkan 1 tahun setelah 9 tahun Divergaran Pembantuan Pempihungan Anggaran Pembantuan Pempihungan Anggaran Anggaran Pembantuan Pempihungan Anggaran Anggaran Pembantuan Pempihungan Anggaran A	POL		1 tahun soletah tahun anggaran berakhir	3 tahun	5 Musnah
Tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berathir 3 tahun anggaran berathir 3 tahun anggaran berathir 3 tahun anggaran berathir 4 tahun 1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berathir 4 tahun 1 tahun setelah tahun 4 ta	1.64	Berkas penetapan alokasi Anggaran Dekonsentrasi dan Tu	1 tahun setelah tahun anoncera herakhir	3 tahun	Remarket
ntrasi dan Perebantuan dan 1 tahun setelah tahun 3 tahun anggaran berakhir ditahun anggaran berakhir ditahun setelah tahun anggaran berakhir ditahun setelah Penghibungan Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran (PAN) diundangkan diundangkan diundangkan diundangkan tahun setelah 1 tahun setelah 4 tahun 6 tahun 6 diperbaharui 1 tahun setelah 1 tahun 1 tahun setelah 1 tahun 1 tahun setelah 1 tahun 1	100	Bahan Penyusunan Anggaran Dekonsentrasi diantaranya : - Surat penyampaian rincian kegiatan ke Kanwil Digen Angaran - Rincian Anggaran - Perubahan anggaran / biaya	1 tahun setelah tahun anggaran beralchir	3 tahun	
Megara dan Tugas  Anggaran Pembantuan dan 1 tahun setelah tahun 4 tahun anggaran berakhir 9 tahun Penghangan Anggaran ANTUAN  ANTUAN  An pengguna anggaran 1 tahun setelah 5 tahun 6 tahun	10 mm	Memoranda hasil penilalan rincian usulan kegiatan Dekonsentrasi dan Pembanaan	1 tahun setelah tahun anoman bondese	3 tahun	Musnah
otunjuk Operasional (PO) 1 tahun setelah 9 tahun Regara (PAN) dundangkan Anggaran Anggaran Pembantuan Penghtungan Anggaran ANTUAN 1 tahun setelah 4 tahun diperbaharui 1 tahun setelah 4 tahun C diperbaharui diperbaharui 1 tahun setelah 4 tahun C	The second second	Konsep Dattar Isian Polaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi, Pembantuan dan Lembaran Kerja (LK)	1 Tahun setelah tahun	4 tahun	Musnah
alikola dan Kepala Desa 1 tahun setelah 9 tahun Negaran Penghitungan Anggaran Negara (PAN) Glundangkan Negara (PAN) Glundangkan Negara (PAN) diundangkan Negara (PAN) diundangkan 1 tahun setelah 4 tahun diperbahani diperbahani diperbahani diperbahani		Daftar Islan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dekonsentrasi, P Iermasuk revisi, perubahan atau pergeserannya	1 tahun setelah Penghibungan Anggaran Negara (PAN)	9 tahun	Dinilai kembali
Mrasi dan Tugas 1 tahun setelah 5 tahun Penghibungan Anggaran Magara (PAN) diundangkan diundangkan 1 tahun setelah 4 tahun 1 tahun setelah 4 tahun 1 tahun setelah 4 tahun 1	PROBLEM TO SERVICE STATE OF THE PROPERTY OF TH	Berkas Penugasan Pembarauan kepada Gubernur, BupatiWatikota dan Kepala Desa ermasuk DIPA/DIP, dan Petunjuk Operasional Petaksanaan Anggaran Pembantuan	1 tahun setelah Penghitungan Anggaran Negara (PAN)	9 tahun	Dinital kembali
ANTUAN an pengguna anggaran 1 tahun setelah 4 tahun diperbaharui 4 tahun diperbaharui	100 0	Perkas Laporan penyampalan pemberian anggaran Dekonsentrasi dan Tugas. Pembantuan kepada DPRD	1 tahun selelah Penghibungan Anggaran Negara (PAN)	S tahun	Dinilai kembali
an pengguna anggaran 1 tahun setelah 4 tahun tanda tangan diperbahani 4 tahun	157	ENYALURAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN PEMBANTUAN	11954Firming		
	4.200.000	enetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atasan pengguna anggaran igratan Dekonsentrasi dan Pembanbuan, termasuk specimen tanda tangan	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Dividai Kembali

Sept-18, Sept-00, being being was (SPP) dan lumptemanya.  Sept-18, Sept-00,	2		m	7	9
Technology Pentbukuan Rebening     Tahun setelah     Descript Perta)     Alterbitian     Tahun setelah     Tahun     Tahun setelah     Tahun setelah     Tahun setelah     Tahun     Tahun setelah     Tahun     Tahun setelah     Tahun     Tahun setelah     Tahun     Tahu	Berkas permintaan pembayaran (SPP) dan lampinannya:  - SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPC SPM-LS, SPM-DU, biyet giro, SPM Nahi.  - Pernagihan / invoice, Faktur pajak, bukti peneriamaan KasiBank beserta bukt pendukungnya, a L: Copy Faktur Pajak, Nota Kredt Bank.  - Permintaan pelayanan jasahservice report dan Berita Acara penyelesaian pek	JR-L.	1 tahun selelah tahun anggaran berakhir	5 tahun	Musnah
U Perntbantu, Register dan Buku Tambahan, Dortar ukuan (DPP), Dattar Minguran Pencairan (DHP), DEKONSENTRASI DAN PEMBANTUAN  DEKONSENTRASI DAN PEMBANTUAN  Peleksanaan Dekonsentrasi dan Pembantuan  Peleksanaan Dekonsentrasi dan Pembantuan  Peleksian, di herakir  Peleksian, di tahun anggaran  Peleksian, di tahun setelah  A Pil.KADA DAN PEMILU  Peleksian, di tahun setelah  A Pil.KADA DAN PEMILU  An Pengawat barang dan jasa, operasional dan kontijansa  A Pil.KADA DAN PEMILU  An Pengawat barang dan jasa, operasional dan kontijansa  A Pil.KADA DAN PEMILU  A Ishun setelah  A Ishun  A Ishun setelah  A Ishun  A Ishun  Berakhir  Berakhir  A Ishun  Berakhir  Berakhir  A Ishun  Berakhir  Berakhir  Berakhir  A Ishun  Berakhir  Berakhir  A Ishun  Berakhir  Berakhi	Buku Rekening Bank, NPWP, Kepulusan Pembukuan Rekening		1 tahun sebelah diperbahani	4 lahun	Musnah
SANTUAN  Jan Pembantuan  S dan PPn, denda  S tahun setelah  S tahun  S tahun  S tahun  S tahun  A tahun  S tahu	2.4 Pembukuan anggaran terdiri : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Dafu Pembukuan Pencairan Pembukuan (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), Rekening Koran		1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Daerah (Perda) diterbitian	9 Bahun	Danibal Kembalii
2 tahun setelah 8 tahun E 2 tahun setelah Bahun 6 tahun setelah 8 tahun diperbahanu 3 tahun setelah 3 tahun diperbahanu 3 tahun setelah 1 tahun setelah 3 tahun berakhir 6 tahun setelah 4 tahun berakhir berakhir anggaran 4 tahun berakhir	N KEUANGAN DEKONSENTRASI DAN PEMBANTUAN				
2 tahun setelah 8 tahun 1 tahun setelah 3 tahun diperbahanu 3 tahun diperbahanu 4 tahun setelah 1 tahun setelah 3 tahun 4 tahun berakhir berakhir	maan keuangan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Pembanbuan a sisa atau penerimaan lainnya		2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	8 tahun	Doubal kembali
ensi 1 tahun setelah 3 tahun diperbahani 3 tahun 1 tahun setelah 4 tahun berakhir berakhir	maan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPn, denda menyelesaikan pekerjaan, dii		Z tahun setelah tahun anggaran berakhir	8 tahun	Dinital tomball
2 tattun setelah 3 tatun diperbaharui 3 tatun diperbaharui 3 tatun diperbaharui 4 tatun berakhir	NN ANGGARAN PILKADA DAN PEMILU				
cense 1 tahun setelah 3 tahun diperbahanu 3 tahun setelah 3 tahun diperbahanu 4 tahun setelah ban 4 tahun berakhir ban berakhir	I ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU		Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Ow		REMORE
jensi 1 tahun setelah 3 tahun diperbahanul 1 tahun setelah 4 tahun juan berakhir	ingan Pilikada dan penyusunan anggaran bahbuan Pemily		2 tahun selelah diperbahansi	3 tahun	Permangal #
1 tahun setelah 4 tahun juan (ahun anggaran berakhir	manistandar belanja Pegawai, barang dan jasa, operasional dan ada dan bamuan Pemau	kondjensi	1 tahun selelah diperbahanu	3 lahun	Permanen
	dencana Kegistan dan Anggaran (RKA) Pikada KPUD dan Perwi pinsi, Katirkota, PPK, PPS, KPPS dan Panwasda, permohonan f Panwas	asda,	1 tahun sotelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah

4	1 tahun setelah 4 tahun Musnah tahun anggaran berséhir	1 takun setelah 4 takun Musnah takun anggaran berakhir	1 tahun selelah 4 tahun Musnah tahun anggaran berakhir	5 tahun setelah 4 tahun Musnah tahun anggaran beraikhir	1 tahun setelah 5 tahun bermanen Permanen berakhir	2 tahun setelah 3 tahun perenganan tahun anggaran berakhir		5 tahun setelah 5 tahun Permanen g tahun anggaran berakher	5 tahun setelah 5 tahun Permanen 9 tahun berakhir	5 tahun setelah 5 tahun Dinisi Kembali tahun anggaran berahar
2	1.4 Berkas pembahasan RKA Pilkada dan bantuan Pemiliu	1.5 Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pakada dan bantuan Pemilu Propinsi dan Kabrikota	1.6 Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Propinsi dan Kabrikota dan bantuan biaya Pemilu dari APBD	1.7 Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada	1.8 Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah Pilkada, dan bahtuan biaya Pemilu dari APBD	1.9 Nota persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan bantuan biaya Pemilu dari APBD	2 PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU	2.1 Peraturan Daerah APBD Pakada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemau	Penyabaran APBD Belanja Prikada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemiliu	DASK Belanja Pdikada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemutu

100				
NUMBER OF STREET	2.4 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitis Pemilihan Kecamatan (PPK)	1 tahun setelah diperbahani	9 Estern	Masmah
100	2.5 Berkas Penetapan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) belanja Pilcada dan Anggaran Buya Bantuan Pemilu untuk KPUD dan Pamassda	5 bahun setelah Perhibungan Anggaran Daerah	5 tahun	Permanen. F
19979	2.6 Kontrak Jasa dan Order Pakada dan Belanja Baya Bantuan Pemilu	(Perda) dierbikan 1 tahun setelah pekerjaan	5 tahun	Dinkai Kembak
16.	2.7 Permintaan pelayanan jasa-Service report dan Benta Acara Penyelesalan Pekerjaan Pakada dan belanja biaya bantuan Pemily	diserahbenmakan 1 tahun setelah pekerjaan	5 tahun	Musnah
2.8	Bukti Pengeluaran Kas/Bank untuk belanja barang Pilkada dan baya bantuan Pemilu	5 tahun setelah Perhibungan Anggaran Daerah (Perda) diterbisan	5 tahun	Musnah
Committee of the commit	Surat pengajuan dana pengasian kas Pilkada dan blaya bantuan Pemilu     Surat permintaan dana Pilkada     SPP - PK     SPM - PK     Buku Rek, Bank     SPM Nhul	5 tahun setelah Perhitungan Anggaran Daerah (Perda) diterbitkan	5 tahun	Musmah
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	- SPM-BT - SPM-BT - Faktur Pajak - Kep Pembukuan Rek		ll like	
place of the first field field (CC)	2.10 Pembukuan kegiatan Pilkada dan baya banbaan Pemilu  - Buku Kas umum dan buku pembantu  - Register/Buku tambahan  - Dahar pembukuan pencairan/pengeluaran (DPP)  - Dahar himpunan pencairan/pengeluaran (DHP)  - Rekening Koran	5 tahun selelah Perhibungan Anggaran Daerah (Perda) deerbibkan	5 lahun	Denilar Kembali

118	2	3	4	9
	2.11 Berkas penerimaan komisi, rabat pembayaran pengadaan jasa, bunga pelaksanaan Pilkada/Pemilu	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Deerah (PAD) Perda diterbitkan	9 tahun	Dinibi Kembal
2.12	Bukii Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1 tahun sekelah Perhitungan Anggaran Daerah (Perda) diserbikan	9 tahun	Dinilai Kembali
N. A	2.13 Berkas tagihan/permintaan phak ketiga :  - Permohonan permintaan dana - Bukti-bukti/pembayaran persyaratan : penagihan/invoice, taktur pajak permintaan - Pelayanan jasa, nota kredit bank, berita acara peryelesalan pekerjaan - SPM - BT, Bäyet Giro	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Daerah (PAD) Perda diterbitkan	5 tahun	Musnah
No.	2.14 Borkas setor sisa dana PilkadarPernilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa gito, dan lain-lain	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Daesah (PAD) Penda	9 tahun	Musnah
60	PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU			
1	1 Dokumen penyedisan pembisyaan kegiatan operasional PPKO Pemitu (PPKO)     Pusat, Propinsi, dan PPKO Kabupaten/Kota termasak perubahan/pergeseran/ revisinya	2 tahun seselah tahun anggaran berakhir	8 tahun	Permaner
60	Berkas Penetapan bendahara dan atasan langsung bendahara KPUD Propinsi, KabiKota, Parwasda dan pemegaing uang muka cabang (PUMC) PPK dan Parwas	1 tahun setelah deerbahana	9 tahan	Musnah

	2	10	4	40
3.3 Berkas penyaluran blaya pemilu ke transfer bank dan lain-tain	3.3 Berkas penyakuran biaya pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya buka transfer bank dan lain-tain	1 tahun setelah Perhibungan Anggaran Negara (PAN) diundangkan	9 tahun	Design Kembali
3.4 Berkas Penetapan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Beya	in Otorisasi (SKO) <b>B</b> aya Operasional Pemilu	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Negara (PAN) diundangkan	5 tahun	Permanen
3.5 Kontrak Jasa dan Order Pelaksanaan Pemlu	lan Pemilu	1 tahun setelah pekorjaan diserahtermakan	5 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Dinilal kembali
3.6 Permintaan Pelayanan jasahservice report dan Berita Acara Pekerjaan	s report dan Berita Acara Penyelesalan	1 tahun setelah pekerjaan diserahterimakan	5 tahun	Musnah
3.7 Bukii Pengeluaran Kasribank untuk Belanja Barang	Belanja Barang	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Negara (PAN) drundangkan	9 tahun	Dinital kembali
3.8 Berkas perminitaan pembayaran  - Sural Permintaan Dana - SpRAPK - SPARPK - Buku Rek Bank - Rekening Koran - SPM Nini - SPM Nini - SPP Nini - SPP D - SPP O - SPP O - SPP Nini - NPWP - SPP O - SPP Nini - NPWP - SPP O - SPP Nini - NPWP -	Pemesanan Barang (SPB)	1 tahun seselah Perhitungan Anggaran Megara (PAN) diundangkan	9 tahun	Musnah

	2	3	4	10
0 11	Buku Kas Umum (BKU)     Buku Kas Umum (BKD) Dana Pemilu, BKP Tunat, BKP Bank, BKP Pajak,     Buku Kas Pembantu (BKP) Dana Pemilu, BKP Tunat, BKP Bank, BKP Pajak,     BKP Uang Muka Kerja, BKP Penermaan Lain-lain, BukurKartu Pengawasan     Anggaran Dan BukurKartu Pengawasan Kontra	1 tahun setelah Perhibungan Anggaran Negara (PAN) dundangkan	9 tahun	Dimital kembali
0.	PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN			
252	1. PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN APBD (TERMASUK ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU)			
2.00	Berkas Laporan Administrasi penggunaan dana Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemau diantaranya : - Laporan bulanan - Laporan realisasi anggaran	1 tahun setelah Perhitungan Anggaran Daerah (PAD) Perda deerbilkan	9 tshun	Musmah
12 88	Berkas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pikada dan Anggaran-anggaran Biaya Bantuan Pemilu diantaranya : - Laporan GubernurBupat/Walkota kepada DPRD	1 tahun sekelah Perhibungan Anggaran Daerah (PAD) Perda diterbitkan	5 tahun	Permanent
32	Laporan Hasii Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Daerah oleh Badan     Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	1 tahun setelah Perhbungan Anggaran Daerah (PERDA) otterbitkan	5 tahun	Permanent
88	1.4 Persetujuan Dewan Perwakian Daerah tentang Perhitungan Anggaran Daerah, Risalah Rapet, dil	1 lahun setelah Perhitungan Anggaran Daerah (PERDA) diterbitikan	3 tahun	Permanen
2	1.5 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	2 tahun setelah diredakianuti	8 tahun	Ointal kembali

-				
1.6	Nota Perhitungan Apparatus Council (Apparat	3	4	io.
	(CBay) utusen named a section (MaGD)	2 tahun setelah	8 tahun	Divilsi kembali
1.7	1.7 Obyek Pemprikaan Lembaga Funosional (Olabelik)	and income and		
-	- Rencana Kerja - Rencana Kerja Pengawasan - Hasi Pemeriksaan Tahunan	1 tahun setetah tahun anggaran beraktir	4 lahun	Musnah
00	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsioosi			
	a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak LarjuVTanggapan MHP	2 tahun setelah terbil	3 tahun setelah pemeriksaan	Dinilal kembali
6	1.9 Masil ovaluasi, pengawatan dan penganasan		Selesin	
*MA	Baya Bantuan Pemau	2 tahun setelah ditindaklanjus	8 tahun	Dinital kembah
0	1.10 Dokumen Penyelesalan Permasalahan keuancalan Downski semanan Angelesalah Permasalahan keuancalan Salahan			
200	Banbuan biaya Pemau :  a. Tumbutan Perbendaharaan  b. Tumbutan Gani Rugi	5 tahun setelah kasus memperoleh Keputusan Hukum Tetap	2 tahun setelah Hak dan Kewajiban Hanse	Dinilai kembali
2	PERTANGGUNGJAWABAN, PET APODANI DANI SENTENCE		0.000	
0	OPERASIONAL PEMILU, DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN			
884450	Berkas Laporan Pertanggunggwabankeuangan/dana Pemilu KPUD Provinsi, Kabupaten-Kota, PPK dan Panwasda diantanaya:     Laporan bulanan, LPJ, Laporan Postsi Anggaran dan Kas (LPAK)     Laporan realisasi pertanggungjawaban pencairan dana dan sisa anggaran, realisasi penggunaandan sisa kas, pemungutan dan pengetoran pajak dan	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	9 tahun	Muşnah
2.0 85	Figure Control of the			
687	diantarianya Laboran Sekretaris KPUD, Sekretaris PPK dan Sekretaris Parwas	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Peintanen
8	n Permitmenteras			
3	Laporain bulanan, Laporan realisasi anggaran	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	9 tahun	Dinia kembali
		The second secon		

2	e		vo.
Berkas Laporan evaluasi Triwulan GubernunfBupati/Walrikota/Kepala Desa     Ientang pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan pembantuan	1 tahun setelah tahun anggaran berakhir	2 tahun	Musnah
2.6 Berkas Laporan evaluasi Tahunan GubernuriBupatr/WahkotarKepala Desa tentang pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan pembantuan	1 tahun seselah tahun anggaran berakhir	S tahun	Permanen
2.6 Hasii Pemeriksaan Keuangan BPK dan Aparatur pengawas lain	2 tahun setelah dandaklanjuti	8 tahun	Ornital kombali
2.7 Obyek Pemeriksaan Lembaga Fungsional (OBRak) - Rencana Kerja - Rencana kerja pengawasan - Hasil Pemeriksaan Tahunan	1 tanun sebelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah
2.8 Hasil evaluasi, pengewasan dan pemeriksaan pelaksanaan Pemilu. dekonsentrasi dan pembanbuan	2 tahun setelah ditindaklanjub	8 tahun	Deniai kembali
2.9 Berkas Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak lanjut/Tanggapan MHP	2 tahun setelah terbit	3 tahun setelah persoalan selesar	Dinital ixembali
Dokumen Penyelesaian Permatalahan Keuangan Daerah termasuk Pilkada dan bantuan biaya Pemilu:     a. Tuntutan Perbendaharaan     b. Tuntutan Ganti Rugi	5 tahun setelah kasus memperoleh Keputusan Hukum Tetap	2 tahun setelah Hak dan Kewajiban Habis	Dinital kembali

